



Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat

Naufal Fikri Khairi

Indonesia International Studies Academic Utilization Community (IISAUC), Indonesia;
naufalfikri1999@gmail.com

| Dikirim: 05 04 2021 | Direvisi: TT BB 20XX | Diterima: TT BB 20XX | Dipublikasikan: TT BB 20XX |

Keywords

*Cosmopolitanism,
Globalization,
United States.*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to determine the failure of cosmopolitanism in the United States and the factors behind it. Cosmopolitanism is an interesting topic to discuss because it is the impact of globalization which is considered a solution in achieving lasting peace with a world government and world citizenship that knows no national borders. The United States as a role model for hyper-globalist thinkers and adherents of democracy should be able to create great potential for cosmopolitanism, because there is already democracy and other positive values of globalization. The research uses the concept of cosmopolitanism and skepticism. The research method used is descriptive qualitative by using data collection techniques in the form of literature study. The results obtained are that the United States is in fact unable to create idealism from cosmopolitanism in various forms ranging from morals, laws, romanticism, and others. The United States is not able to create a common identity, lasting peace, fulfill the rights of equality and cultural freedom, which can be seen from the ingrained behavior of racism, rejection of European culture, and policies of protectionism..

Kata Kunci

Amerika Serikat,
Globalisasi,
Kosmopolitanisme.

ABSTRAK

Tujuan dari paper ini yaitu untuk mengetahui kegagalan kosmopolitanisme di Amerika Serikat dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kosmopolitanisme menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena merupakan dampak dari globalisasi yang dinilai merupakan solusi dalam mencapai perdamaian abadi dengan adanya pemerintah dunia dan kewarganegaraan dunia yang tidak mengenal batas negara. Amerika Serikat sebagai *role model* dari pemikir hyper-globalis dan pengikut demokrasi sejatinya mampu menciptakan potensi besar bagi kosmopolitanisme, karena didalamnya sudah terdapat demokrasi dan nilai-nilai positif globalisasi lainnya. Penelitian ini menggunakan konsep kosmopolitanisme dan pandangan skeptis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu Amerika Serikat pada kenyataannya tidak mampu menciptakan idealisme dari kosmopolitanisme dari berbagai bentuk mulai dari moral, hukum, romantisme, dan lain-lain. Amerika Serikat tidak mampu menciptakan identitas bersama, perdamaian abadi, memenuhi hak-hak kesetaraan dan kebebasan budaya, yang mana terlihat dari adanya perilaku rasisme yang telah mendarah daging, penolakan budaya Eropa, dan kebijakan proteksionisme.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang mengaburkan batas-batas teritorial negara sehingga terkesan menjadi *borderless*, kemudian dengan adanya hal tersebut melahirkan liberalisasi pasar yang membentuk perdagangan antar negara, aliran modal, sistem kurs *dollar*, lembaga internasional seperti WTO (*World Trade Organization*) yang membentuk integrasi pasar dunia. Terdapat perkembangan teknologi yang menyebabkan transfer teknologi antarnegara, sehingga dapat menjadi faktor katalis pembangunan di negaranegara. Di bidang lain seperti saling mengenal budaya-budaya antarnegara, integrasi pemerintahan di bawah lembaga internasional (PBB, Uni Eropa, ASEAN, dll), serta mobilitas orang, dan ide/gagasan. Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa globalisasi menjadi kumpulan dari fenomena-fenomena yang membentuk saling ketergantungan yang kompleks antarnegara-negara di dunia (Noris, 2000).

Globalisasi secara umum dapat diartikan seperti penjelasan di atas, ternyata penjelasan tersebut belum sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan globalisasi bukanlah suatu fenomena yang ‘baru’, namun telah ada sejak lama (Musa, 2015). Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa globalisasi telah ada sejak abad ke sebelum masehi, yang ditandai dengan pendudukan wilayah oleh kerajaan-kerajaan. Contohnya seperti zaman perluasaan wilayah Kekaisaran Romawi Kuno yang menaklukkan wilayah lain hingga menjadikan wilayahnya sangat luas, sehingga budaya Romawi memasuki wilayah-wilayah tersebut. Kemudian pada awal masehi ditandai dengan para pedagang Arab, Tiongkok, dan lainnya yang melakukan perdagangan hingga ke wilayah kerajaan yang sangat jauh. Memasuki abad ke 15 dengan imperialisme Eropa, kemunculan sistem *nation-state*, hingga ke abad ke 20 dengan adanya Perang Dunia I, II, dan Perang Dingin, yang setelahnya berkembang pesatnya teknologi (*handphone*, komputer, dll) dan internet (Sujati, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, globalisasi telah ada sejak lama dan memasuki abad ke 20, globalisasi mengalami pemerkuatan proses hingga sekarang.

Globalisasi sendiri diperkuat dengan dukungan Amerika Serikat, selaku pemenang Perang Dunia ke II dan Perang Dingin, sehingga mendapatkan *power* untuk menyebarkan globalisasi salah satunya dengan menyebarkan sistem ekonomi liberal dan ideologi demokrasi. Amerika Serikat pada saat itu memiliki hegemoni yang sangat besar, kemudian menciptakan berbagai macam sistem internasional, salah satunya yakni *Bretton Woods* yang melancarkan kelanggengan ekonomi liberal. Semua kebijakan Amerika Serikat berpihak kepada globalis, yang mana percaya akan globalisasi memberikan dampak positif bagi Amerika Serikat di berbagai bidang (Mayasari, 2019). Peran Amerika Serikat tersebut menjadi penting dalam memperkuat dan mengembangkan proses globalisasi di berbagai bidang, tak hanya ekonomi, namun juga ideologi serta paham-paham yang pro terhadap globalisasi seperti kosmopolitanisme.

Kosmopolitanisme merupakan suatu paham, ide, gagasan yang bertujuan membangkitkan konsep ‘kewarganegaraan dunia’ atau ‘masyarakat dunia’, sehingga membentuk identitas yang tidak berdasarkan teritorial atau batas-batas negara, dan dengannya menciptakan perdamaian. Kosmopolitanisme hadir sebagai dampak dari globalisasi yang membawa perkembangan di segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dimulai sejak abad ke-19, di bidang kemudahan dalam menjalin komunikasi, media, dan transportasi, sehingga membangun interaksi yang lebih besar dan luas di antar masyarakat negara-negara dan membangun kota-kota dengan masyarakat yang memiliki latar belakang, tingkat pendapatan, dan gaya hidup yang berbeda-beda (Ariwibowo, 2019).

Tujuan kosmopolitanisme dalam membangun identitas ‘kewarganegaraan dunia’ tersebut tidak mudah dicapai, dan

sering berujung kepada kegagalan. Para peneliti telah menilai kegagalan kosmopolitan di berbagai bidang. Edmunds (2015) menjelaskan bahwa kosmopolitanisme mengalami kegagalan di negara-negara Eropa, karena adanya stigma buruk terhadap kaum muslim yang berkepanjangan dan tidak kunjung hilang. Kemudian, Hardi dan Sarifudin (2017) menjelaskan kegagalan kosmopolitanisme di Tiongkok, yang disebabkan adanya kebijakan *Great Fire Wall* yang memblokir akses informasi, dan perusahaan-perusahaan browsing dari negara-negara lain. sehingga hal ini mengakibatkan keterbatasan informasi dan interaksi antar masyarakat.

Tujuan dari kosmopolitan dalam membangun identitas juga mengalami resistensi sehingga menyebabkan kegagalan penerapannya di Amerika Serikat. Hal tersebut salah satunya dikarenakan terdapat angka diskriminasi ras (rasisme) yang tinggi di berbagai bidang kehidupan, dan tak jarang terjadi kejahatan berdasarkan kebencian akan suatu ras. Pada tahun 2019, terjadi 7,314 kasus kejahatan akan kebencian, yang mana mayoritas didasari oleh kebencian akan suatu ras sehingga melakukan kekerasan hingga pembunuhan (British Broadcasting Corporation, 2020). Berbagai ras mengalami perlakuan rasis di Amerika Serikat, membuktikan bahwa penerapan identitas kosmopolitanisme akan sulit terjadi. Selain itu, juga terdapat resistensi budaya barat dan kebijakan yang menjadi penghambat pencapaian tujuan kosmopolitanisme di Amerika Seirkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Amerika Serikat yang merupakan pusat dari persebaran nilai-nilai globalisasi dan demokrasi malah tidak berhasil mewujudkan tujuan dari kosmopolitanisme, sehingga hal tersebut menjadi suatu dilema bagi globalisasi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena memiliki tujuan untuk mengetahui kegagalan kosmopolitanisme di

Amerika Serikat dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “*Bagaimana Kegagalan Pemikiran Kosmopolitanisme di Amerika Serikat?*”.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme tidak memiliki pengertian yang baku, akan tetapi terdapat pengertian bahwa kosmopolitanisme memiliki arti ‘Kota Dunia’. Lebih lanjut, mendalam pengertian tersebut, para peneliti menganggap bahwa kosmopolitanisme sebagai alternatif dari *ethno-centric/nasionalisme* yang merupakan paham cinta tanah air dari individu tersebut berasal. Kosmopolitanisme menjadi bangkit kembali setelah munculnya kesadaran akan realitas transnasional yang mana membawa nilai-nilai global yang luas seperti agenda politik seperti hak asasi manusia (HAM), kejahatan global, nilai-nilai lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam tingkat individu, kosmopolitanisme terlihat dari adanya keterhubungan kompleks dengan orang lain, isu, tempat, dan tradisi yang melewati batas-batas negara. Beberapa peneliti mengatakan bahwa kosmopolitan merupakan kemungkinan yang meliputi demokrasi global, kewarganegaraan global, dan kemunculan kerangka kerja sama yang baru di tingkat gerakan sosial transnasional. Kemudian pihak lain berpendapat bahwa kosmopolitan merupakan pembelaan terhadap kepentingan politik yang terlalu besar, serta menantang nilai-nilai tradisional mengenai pemikiran rasa kebersamaan, identitas, dan kewarganegaraan (Griffith & O'Callaghan, 2002).

Griffith dan O'Callaghan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembagian konsep kosmopolitanisme menjadi kosmopolitanisme sosial-budaya ideologi/filosofi, dan politik. Kosmopolitanisme sosial-budaya merupakan kondisi sosial-budaya yang mengacu kepada ‘dunia yang satu’ yang mana pada masa ini orang-orang banyak melakukan kunjungan dari satu negara ke negara lain sehingga

berdampak terhadap meningkatnya keterbukaan budaya-budaya seperti busana dan makanan. Kemudian, pada kondisi tersebut juga kosmopolitanisme dikenal sebagai hal mengenai konsumsi, cita rasa dari makanan, musik, fashion, seni, buku, dan lain-lain yang mana telah tersebar di seluruh dunia. Sementara itu, kosmopolitanisme ideologi/filosofi, menekankan karakteristik kosmopolitan kepada prinsip politik. Adanya ciri khas kosmopolitan sebagai ‘Kewarganegaraan dunia’ mendorong terlahirnya pemikiran komunitas moral dunia, sehingga terlahirnya ide universal seperti Hak Asasi Manusia (HAM). Pada aspek ini, dikatakan kosmopolitanisme dapat berdamai dengan nasionalisme dan patriotisme, akan tetapi hal tersebut masihlah suatu pendapat dan tidak memiliki landasan yang kuat. Ketiga, kosmopolitanisme politik yang mana merupakan bentuk tatanan politik transnasional yang baru dengan menggunakan konsep ‘*Kosmopolitanisme democracy*’. Hal yang menarik dalam aspek ini, yaitu ide pembentukan pemerintahan dunia yang mana membatasi kedaulatan negara-negara, namun tidak berbentuk negara dunia dan lebih kepada lembaga kosmopolitan. Lembaga ini berjalan dengan menolak otoritas dari negara-negara, sehingga membantu berjalannya kebijakan dari PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) dan Uni Eropa. Namun, sekali lagi ide ini masih belum memiliki landasan yang kuat sehingga terkesan abstrak (Griffith & O'Callaghan, 2002).

Kosmopolitanisme memiliki keterkaitan kuat dengan identitas, karena tujuan dari kosmopolitanisme itu sendiri adalah perjuangan identitas “kewarganegaraan dunia”. Terdapat tiga cara membangun identitas, yakni diantaranya *legitimising identity*, yang merupakan sebuah identitas dengan dibangun oleh institusi dan negara, dengan berdasarkan kepada konstitusi, dan multikultural serta etnis. Kemudian, ada *resistance based identity* yang menggambarkan dasar dari sebuah perlawanan

identitas. dalam cara ini, kelompok-kelompok yang termarginalkan dan minoritas, membangun suatu identitas yang menolak adanya peleburan/asimilasi budaya. Ketiga, yakni cara *project based identity* yang mana membangun identitas melalui identifikasi diri sendiri, dengan menggunakan komponen budaya, geografis, dan sejarah (Castells, 2006).

Meskipun belum ada penjelasan secara detail mengenai ide-ide kosmopolitanisme, namun terdapat beberapa penjelasan dari pembagian bentuk-bentuk kosmopolitanisme. Menurut Pauline, bentuk-bentuk kosmopolitanisme antara lain sebagai berikut: kosmopolitanisme moral, kosmopolitanisme hukum, kosmopolitanisme romantis, kosmopolitanisme pasar, dan kosmopolitanisme budaya (Pauline, 1999). Pertama yakni kosmopolitanisme moral, yang merupakan bentuk dari kosmopolitanisme dengan memiliki pandangan bahwa semua manusia itu adalah bagian/anggota dari komunitas moral yang satu terpadu, serta di dalam komunitas tersebut memiliki kewajiban moral bagi keseluruhan manusia lainnya dengan tanpa bertolak/melihat kepada aspek kebangsaan/citizenship, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain.

Kedua, Kosmopolitanisme hukum, yang mana pengertiannya sendiri sebagai pemahaman kosmopolitan dalam mengatur lalu lintas interaksi antara negara-negara di dunia dengan artian kemampuan mengatur interaksi antar warga negaranya dengan warga negara lain, selama interaksi tersebut belum diatur/tidak terdapat perjanjian bilateral maupun multilateral yang sah dan diratifikasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kosmopolitan hukum dapat dairikan sebagai hal dari negara-negara maupun individu untuk berupaya, mencoba membangun interaksi sehingga membentuk hubungan dengan negara-negara dan warga negara lainnya (Pauline, 1999).

Bentuk ketiga adalah kosmopolitanisme romantis yang dianggap merupakan

komponen-komponen yang penting dalam hidup manusia itu sendiri, dengan berdasarkan hal-hal yang abstrak atau immaterial. Contohnya seperti perasaan-perasaan di hati manusia melingkupi cinta, kebersamaan, ikatan, emosi, keimanan, rasa bersama dan saling percaya satu sama lainnya. Tak terbatas hanya dalam hal itu, kosmopolitanisme romantis juga dijelaskan meliputi hal seperti keinginan, kebebasan, cita-cita, cenderung anti-otoritarianisme, dan nilai-nilai seperti kesetaraan kedudukan manusia (Pauline, 1999).

Keempat adalah kosmopolitanisme pasar yang memiliki pengertian bahwa kosmopolitanisme membawa paham bahwa pasar negara harus menjadi pasar ranah global tunggal dengan menganut sistem perdagangan bebas. Melihat dari pengertian tersebut semakin menjadikan kosmopolitanisme pendukung perkembangan dari ekonomi liberal, namun menggunakan dalih promosi seperti “perdamaian di seluruh dunia”, dan mempromosikan peningkatan kebebasan individu dari aturan-aturan yang mengancam kebebasan, serta mengurangi peran dari negara dalam mengatur perdagangan di pasar tersebut, karena pasar telah menjadi tunggal (Pauline, 1999).

Terakhir, yakni kosmopolitanisme budaya, yang mana memiliki pengertian bahwa kosmopolitanisme membawa pandangan bahwa manusia bebas menunjukkan atau mengekspresikan dirinya sendiri dalam budaya yang beragam atau berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan, dunia mengakui kebudayaan yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut merupakan ciri khas dari masyarakat, dalam artian lain adanya toleransi budaya yang tinggi dalam kosmopolitan, dimana baik orang dari berbagai negara dengan memakai budaya seperti baju, celana, dan lain-lain ke negara lain bukanlah merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, kosmopolitan budaya juga digambarkan sebagai bentuk dari kosmopolitan yang berusaha untuk tidak mencoba membentuk keseragaman budaya di

dunia ini, hal itu dikarenakan keseragaman budaya atau homogenisasi budaya akan menghapus berjuta-juta budaya yang ada, sehingga ditakutkan akan menimbulkan dampak negatif seperti pemiskinan budaya (SD & Sarifudin, 2017).

Pandangan Tradisionalis/Skeptis

Globalisasi merupakan fenomena yang memiliki dampak baik dan buruk. Berdasarkan perkembangan globalisasi kemudian memunculkan pandangan kelompok-kelompok yang berbeda dalam merespon globalisasi, kelompok tersebut yakni *hyper-globalis*, *sceptics*, dan *transformationalis*. Kelompok pertama yakni *hyper-globalis* berpendapat bahwa globalisasi sebagai fenomena yang baru membawa negara dewasa ini tidak memiliki peran penting lagi dalam perdagangan global atau ekonomi global, sehingga memunculkan konsep ‘denasionalisasi’, yang dengannya menitikberatkan ekonomi dunia kepada jaringan-jaringan aktor transnasional seperti perusahaan yang dengan istilah *Multinational Corporations* (MNC) dan lembaga keuangan internasional. Kemajuan globalisasi membawa tersebut membentuk *global governance* dan dengannya membawa hibridasi budaya.

Kelompok kedua yakni *sceptics* atau tradisionalis yang merupakan pemahaman globalisasi sebagai fenomena yang telah terjadi sejak zaman dahulu sekaligus membantah pendapat dari *hyper-globalis* mengenai peran negara yang dianggap lemah, padahal negara menurut kaum *sceptics* masih memiliki kekuatan yang besar dalam kebijakannya dan juga dalam perdagangan. Anggapan *hyper-globalis* mengenai perdagangan global dianggap merupakan hal yang keliru, semua itu ada karena adanya regionalisasi dari negara-negara kawasan, sehingga tidak pantas meremehkan peran negara. Kelompok ketiga yakni *transformationalis* yang merupakan penengah antardua kelompok sebelumnya. Kelompok ini menjelaskan bahwa globalisasi terjadi sejak

awal milenium akan tetapi proses menjadi tidak jelas dikarenakan kebingungan dalam membedakan domestik dan internasional. Kemudian globalisasi membawa dampak yang mana terjadi hingga sekarang dan membawa banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. kelompok ini menganggap negara merupakan unit/aktor yang otonom dalam mengelola kebijakan, akan tetapi dalam memutuskan kebijakan luar negerinya harus menyetarakan dengan lembaga-lembaga internasional yang ada dan telah terikat di dalamnya (Rianto, 2004).

Pandangan kelompok skeptis mengenai negara memiliki *power* untuk membendung pengaruh globalisasi tersebut menjadi keterkaitan dengan penolakan terhadap kosmopolitanisme. Hal tersebut dikarenakan, kosmopolitanisme merupakan produk dari globalisasi yang mana berusaha membuat negara-negara terintegrasi dalam pemerintahan dunia dan identitas masyarakat dunia. Namun, jika negara melakukan penolakan terhadap nilai-nilai demokrasi, akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini mengenai keterkaitan antara Amerika Serikat, globalisasi, kosmopolitanisme, dan pandangan kelompok skeptis terhadap hasil yang didapatkan. Hal ini menjadi penting, karena hasil yang didapatkan akan menjadi penentu apakah akan memperkuat argumen kaum skeptis atau malah melemahkannya.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui berbagai macam karakteristik, sifat, nilai yang dapat menjelaskan isu, perilaku, dan fenomena-fenomena yang telah terjadi dengan tersusun sederhana dan sistematis berdasarkan data-data yang didapatkan (Silalahi, 2009). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder

berupa penelitian-penelitian yang telah ada dengan topik yang bersangkutan terdahulu, contoh dari sumbernya yaitu buku, paper, artikel, laporan, dan lain-lain sehingga menjadi referensi dan menunjukkan aspek kebaruan dari penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan analisis. Pertama, reduksi data, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai penelitian yang akan dikerjakan, lalu melakukan eliminasi terkait data yang tidak berhubungan dan mensortir/mengatur data yang didapatkan dalam bentuk list. Kedua, menyajikan data, yaitu data-data yang telah didapatkan diubah ke dalam bentuk naratif yang disederhanakan dengan kalimat-kalimat dan penjelasan yang mudah dipahami. Terakhir, yaitu penyimpulan data, dengan artian mengambil hasil yang didapatkan dari semua data yang terkumpul dan telah dijelaskan, yang mana ini akan menjadi hasil akhir dari penelitian sekaligus menjawab menjawab rumusan masalah (Silalahi, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indikator dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam terciptanya kosmopolitanisme dapat diketahui setelah menelaah konsep Kosmopolitanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal pertama yang harus diketahui adalah pencapaian tujuan dari kosmopolitanisme yaitu bersatunya manusia ke dalam satu identitas dan terciptanya perdamaian abadi. Oleh karena itu, jika suatu negara mampu mengatasi perbedaan identitas dan membawa perdamaian di dalamnya, maka akan berhasil terciptanya kosmopolitanisme. Begitu pun sebaliknya, jika suatu negara tidak dapat mengatasi permasalahan perbedaan identitas dan tidak mencapai perdamaian karenanya, maka negara tersebut telah gagal menciptakan kosmopolitanisme.

Berdasarkan konsep kosmopolitanisme dari Pauline, terdapat indikator lain dalam menentukan keberhasilan kosmopolitanisme

yaitu keterbukaan dan hubungan baik terhadap negara lain dan warganya, adanya kesetaraan kedudukan antar manusia, memakai sistem perdagangan bebas, dan terdapatnya kebebasan dalam budaya yang berbeda-beda (Pauline, 1999). Penjelasan mengenai indikator ini berkaitan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan globalisasi seperti keterbukaan negara, serta kesetaraan dan kebebasan hak manusia. Sehingga negara juga harus memperhatikan aspek tersebut, sehingga mencapai kosmopolitanisme.

Terdapat berbagai contoh kegagalan kosmopolitanisme diantaranya terjadi di Eropa. Di Eropa, setelah kejadian 9/11 di Amerika Serikat, mulai munculnya dampak negatif terhadap kaum muslim yaitu adanya *islamophobia* (ketakutan akan muslim yang dianggap sebagai ekstrimis, radikal dan pelaku terror di berbagai negara). Adanya fenomena ini, di Eropa mengakibatkan kaum muslim menjadi termarginalkan, ditakuti, serta mengalami diskriminasi. Hingga sekarang, *islamophobia* masih dapat terlihat di berbagai negara baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Dikarenakan peristiwa tersebut, kaum muslim dinilai mengalami *de-legalization* (kehilangan fundamental dari perlindungan hak asasi) dan *hyper-legalization* (kehilangan hak beragama), sehingga tidak memiliki kebebasan dalam beragama dan mempraktikan budayanya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dan kosmopolitan memiliki keterkaitan kuat karena dalam kosmopolitan itu sendiri tidak hanya mengatur identitas masyarakat dunia, budaya dalam kehidupan bersama, persatuan identitas, tetapi juga keadilan yang mana tercermin dari hak asasi manusia (Edmunds, 2015).

Contoh lain dari kegagalan kosmopolitanisme yaitu di Tiongkok dengan adanya kebijakan proteksionisme terhadap negara-negara lain. Kebijakan proteksionisme melambangkan penolakan terhadap kebijakan negara lain, isu sosial budaya, teknologi, dan ekonomi. Jika suatu negara melakukan penolakan, maka Kosmopolitanisme akan sulit

terrealisasi. Hal tersebut karena Kosmopolitanisme berusaha membentuk integrasi identitas tidak hanya di tingkat masyarakat tetapi juga negara, yang mana harus terdapat aspek saling keterhubungan (SD & Sarifudin, 2017).

Pembahasan

Kegagalan Penerapan Kosmopolitanisme di Amerika Serikat

Berdasarkan indikator pencapaian kosmopolitanisme yang telah dijelaskan, penulis berpendapat bahwa Amerika Serikat gagal menciptakan kosmopolitanisme yang terlihat dari ketidakmampuan membentuk identitas bersama, menciptakan perdamaian, kesetaraan, dan kebebasan budaya di masyarakat. Amerika Serikat tidak dapat mengatasi permasalahan perbedaan identitas sehingga yang terjadi adalah adanya rasisme yang kuat di masyarakatnya. Perilaku rasisme yang sangat besar, hal ini dapat dilihat dari data *The FBI's Hate Crime Statistics Report*, di tahun 2019 terdapat 7,314 kasus kejahatan berdasarkan kebencian dan terdapat 8,559 pelaku penyerangan, yang mana 57.6% kasus dikarenakan kebencian terhadap ras dan etnis, serta 20.1% dikarenakan kebencian terhadap agama tertentu (*FBI's Hate Crime Statistics*, 2019). Rasisme yang kuat ini mencederai nilai-nilai HAM seperti kesetaraan dan kebebasan ras di Amerika Serikat, sehingga akan sulit membentuk suatu identitas bersama dan terciptanya perdamaian abadi di dalam masyarakat.

Keterbukaan negara dan masyarakat terhadap budaya negara lain terutama Eropa, juga menjadi suatu kegagalan dalam kosmopolitanisme. Amerika Serikat kurang menyukai kentalnya budaya Eropa di kehidupan sehari-hari dan terkesan mendominasi, dikarenakan kenangan pahit ketika dijajah oleh negara-negara Eropa. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat lebih memilih membuat budayanya sendiri yang dianggap lebih tinggi dan memiliki kedudukan di atas budaya Eropa, serta disukai oleh

rakyatnya sendiri (Julianotti & Robertson, 2009). Hal ini menjadi suatu hambatan kuat bagi terealisasinya kosmopolitanisme, dikarenakan terdapat faktor sejarah yang menjadikannya susah untuk dihilangkan. Penolakan terhadap budaya Eropa, meski tidak semuanya namun memiliki arti bahwa Amerika Serikat sulit membentuk identitas bersama, membentuk budaya bersama dan toleransi terhadap berbagai budaya yang ada.

Menurut penulis, Amerika Serikat juga gagal dalam membentuk keterbukaan negara yang menjadi nilai penting dalam globalisasi. Amerika Serikat memiliki berbagai kebijakan proteksionis yang membuat proses persatuan negara dan masyarakat dunia menjadi terhambat. Salah satu contohnya yaitu terdapat kebijakan pelarangan imigran masuk ke Amerika Serikat, serta pembangunan tembok perbatasan yang mencerminkan ketidakterbukaan negara kepada beberapa masyarakat dengan identitas yang berbeda.

Rasisme yang Tinggi di Amerika Serikat

Rasisme adalah suatu pandangan terhadap rasa yang didasari pada emosional yang kuat terhadap orang-orang dengan ras yang berbeda sehingga memunculkan sikap diskriminasi dan eksloitasi yang dilakukan oleh orang-orang dengan sikap rasis. Penindasan tersebut dapat terjadi karena adanya rasa keunggulan budaya atau superioritas yang terdapat dalam kelompok budaya, sehingga memunculkan perilaku penindasan terhadap orang lain. Perilaku rasis sering kali didapatkan oleh orang-orang dengan darah maupun penampilan fisik yang menggambarkan rasnya seperti Afrika/Negro, Afrika-Amerika, Asia, dan Latino (Lustig & Koester, 2003).

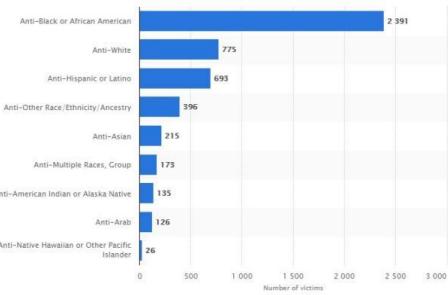
Perilaku rasis ini sendiri telah ada sejak zaman pendudukan Amerika beserta masyarakat aslinya yang dikenal dengan ‘Indian’. Kemudian peristiwa tersebut melahirkan adanya perbudakan yang dilakukan oleh ‘Kulit Putih’ terhadap ras lain, terutama ras ‘Kulit Hitam’, sehingga membentuk superioritas dan kesenjangan yang tinggi di

antara kedua ras tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak hanya di Amerika, sebelumnya sudah jauh dilakukan oleh Bangsa Eropa saat melakukan penjajahan dan penaklukan wilayah-wilayah. Kemudian, perilaku rasis tersebut telah mendarah daging di masyarakat Amerika Serikat, karenanya perilaku dan sifat rasis sangat susah untuk di hilangkan karena menyangkut sejarah dan kebiasaan yang telah ada sekitar lamanya (Lustig & Koester, 2003).

Suatu penelitian menjelaskan mengenai persepsi orang Amerika Serikat dengan kulit putih terhadap orang kulit hitam. Hasilnya menunjukkan bahwa ras kulit putih memandang ras kulit hitam sebagai ‘tidak beradap’ dan dilahirkan untuk menjadi pelayan, sedangkan kulit putih adalah sesuatu yang ‘normal’. Pandangan ini lah yang dianggap menjadi latarbelakangi kulit putih mendukung perbudakan terhadap kulit hitam dan melahirkan perilaku rasis yang mendarah daging. Selain itu juga terdapat pandangan bahwa kulit hitam lebih pintar menari daripada kulit putih, tentunya ini memandang ras tersebut lebih pintar ditempatkan dalam hiburan (Burton, 1999).

Perilaku rasis tersebut masih ada dan terbilang tinggi di Amerika Serikat. Sehingga dalam Kosmopolitanisme menjadi suatu kegagalan dalam menciptakan masyarakat yang damai dan bersatu dalam satu identitas, kemudian juga sebagai kegagalan dalam bentuk kosmopolitan moral dan kosmopolitan romantisme. Untuk memahami angka perilaku rasis dapat dilihat lebih lanjut melalui bagan berikut:

Gambar 1. Jumlah Korban Kejahatan Rasial di Amerika Serikat pada Tahun 2019



Sumber: (Statista Research Department, 2020)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa di Amerika Serikat masih terdapat banyak kasus rasis yang menjadi kasus kejahatan dan bahkan berujung kepada pembunuhan. Amerika Serikat memiliki berbagai macam ras yang tinggal di dalamnya, diantaranya ras Afro-American, Hispanic atau bisa disebut dengan Latino, Asian, Indian, Alaska, Arab, dan lain-lain. Kemudian, pada data yang ditunjukkan oleh statistik ini, yaitu terdapat jumlah korban kejahatan rasial yang menarik, mengarah kepada kelompok ras atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2019. Terlihat banyak sekali angka kejahatan yang terjadi di tahun tersebut, dengan kasus yang paling kecil yakni dari Anti-Native Hawaiian, kemudian disusul oleh Anti-Arab, Anti-American ‘Indian’ atau pribumi Alaska, Anti-multi ras, Anti-Asian menunjukkan kasus yang dilatarbelakangi oleh kebencian terhadap orang Asia yang diidentifikasi melalui perawakan (mata sipit, rambut hitam, dan lain-lain), kemudian Anti-ras atau etnis lainnya, Anti-Hispanic atau latin, Anti-Kulit Putih yang mana merupakan kebalikan dari penindasan kulit putih kepada kulit hitam dengan kata lain kulit hitam lah yang menindas kulit putih karena didasarkan beberapa faktor seperti kebencian akan penindasan yang kulit putih lakukan kepada kulit hitam dan lain-lain, hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku rasial di Amerika Serikat tidak hanya satu arah saja. Kemudian, angka kejahatan yang paling tinggi di tahun 2019 yakni kejahatan seseorang atau kelompok yang dilatarbelakangi oleh anti kulit hitam atau anti Afro Amerika, yang mana menyentuh angka 2.391 korban kejahatan kebencian anti-Hitam atau Afrika-Amerika tersebut (Statista Research Department, 2020).

Masih banyaknya perilaku rasis di kalangan masyarakat Amerika Serikat dan tidak adanya solusi nyata dalam menyelesaikan masalah ini menjadikan kosmopolitanisme sulit untuk dicapai. Hal ini dikarenakan rasisme yang kuat tersebut menciderai nilai-nilai HAM seperti keadilan,

kesetaraan antar manusia dan kebebasan dari ras di Amerika Serikat, terutama ras non-Kulit Putih.

Penolakan terhadap Budaya Eropa

Salah satu bentuk dari kosmopolitan yakni kosmopolitan budaya yang mana adanya kehidupan bersama dalam budaya serta nilai-nilai toleransi dan kesetaraan yang kemudian menimbulkan kedamaian abadi. Akan tetapi di Amerika Serikat, kosmopolitanisme budaya sulit untuk dicapai. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Amerika Serikat yang tidak ingin mengakui dan menyanjung budaya Eropa, karena sakit hati yang diterima setelah dijajah oleh Bangsa Eropa dinilai merupakan masa kelam. Oleh karenanya, Amerika Serikat melakukan perlawanan berupa tidak mengakui budaya Eropa sebagai bagian dari budaya masyarakat Amerika Serikat, dalam hal ini dapat dilihat dari budaya permainan yang menjadi salah satu bukti adanya sikap Amerika Serikat tersebut.

Budaya permainan yang dipopulerkan oleh Negara-Negara/Bangsa Eropa misalnya seperti sepak bola atau yang disebut ‘football’ kepada hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Akan tetapi, negara-negara/Bangsa Amerika Serikat menilai bahwa permainan-permainan yang dipopulerkan oleh Eropa masih memiliki nilai-nilai kolonialisme, nasionalis dan sosialis lama, sehingga membangkitkan ingatan buruk dari Bangsa Amerika atas penjajahan yang dilakukan Bangsa Eropa di masa lalu. Hal ini kemudian membangkitkan semangat Bangsa Amerika Serikat dalam membentuk budaya tandingan dan menolak untuk terlalu ‘memuja’ budaya permainan-permainan dari Bangsa Eropa. Budaya tandingan yang dipopulerkan Amerika yaitu *American Football* dan *Baseball*, kemudian budaya tersebut mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat/Bangsa Amerika itu sendiri. Sekarang menjadi suatu fakta bahwa *American Football* dan *baseball* merupakan permainan populer di Amerika, serta permainan sepak

bola/*football* kurang disoroti di Amerika, bahkan pergelaran Piala Dunia tidak menjadi suatu kepentingan bagi Amerika Serikat dan cenderung mengolok-oloknya (Giulianotti & Robertson, 2009). Kemudian adanya perbedaan penggunaan kata seperti *football* di Amerika berarti *American Football* (*Rugby*), sedangkan sepak bola memakai kata ‘*soccer*’, hal ini sekaligus menjadi pembedaan antara budaya Eropa dan Amerika. Fenomena resistensi/penolakan budaya Eropa di Amerika Serikat ini menurut penulis menjadi penguatan argumen kelompok skeptis. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat menolak budaya-budaya yang dibawa oleh globalisasi ke dalam wilayahnya, dalam kasus ini yaitu penolakan dan kebencian terhadap Budaya Eropa.

Kebijakan Proteksionis Amerika Serikat terhadap Imigran

Kosmopolitan memiliki bentuk kosmopolitan hukum yang mengatur interaksi antarnegara dan masyarakat agar terbentuknya hubungan yang harmonis dan tanpa batas, sehingga terjadinya integrasi negara dan masyarakat ke dalam pemerintahan global dan kewarganegaraan dunia. Akan tetapi, Amerika Serikat memiliki berbagai macam kebijakan proteksionisme (perlindungan negara) yang membuat interaksi dan potensi integrasi tersebut tidak terjadi, salah satunya yakni kebijakan anti-imigran Amerika Serikat berupa tembok perbatasan. Kebijakan tersebut membuat tembok perbatasan dengan panjang 654 mil atau dapat dikatakan lebih dari 1.000 km, yang terdapat di garis perbatasan selatan Amerika Serikat yang mana berbatasan dengan meksiko. Tembok perbatasan itu sendiri terdiri dari 354 mil tembok pembatas untuk membatasi para pejalan kaki, kemudian terdiri dari 300 mil pagar perbatasan yang digunakan untuk menghentikan kendaraan-kendaraan yang melewati batas tanpa izin (BBC, 2019).

Pembangunan tembok ini dilanjutkan lagi oleh Presiden Donald Trump dan berkomitmen akan membangun lebih panjang lagi tembok tersebut. Alasan dari pembangunan tembok ini

yaitu tidak lain sebagai upaya peningkatan keamanan nasional dari Amerika Serikat terhadap ancaman-anacaman dari luar negara seperti imigran gelap, terorisme, dan perdagangan narkotika. Trump menilai terjadi peningkatan krisis kemanusiaan dan keamanan di berbagai daerah perbatasan selatan Amerika Serikat, yang mana disebabkan oleh ribuan imigran gelap yang datang ke Amerika dari berbagai negara (BBC, 2019).

Berdasarkan data yang didapatkan, pada tahun 2017 hingga tahun 2018, terdapat sejumlah imigran gelap asal Meksiko yang ditangkap di perbatasan sebanyak 100.000 orang, selain itu terdapat klaim suaka yang naik menjadi 16.000 orang yang mengalami kenaikan hingga 43%. Data tersebut menggambarkan banyak sekali masyarakat negara lain yang ingin masuk ke Amerika Serikat namun tidak memiliki izin. Kemudian, dari berbagai kelompok yang datang di Amerika Serikat tersebut, merupakan keluarga atau orang-orang yang mengungsi karena atau melarikan diri dikarenakan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Amerika Tengah. Namun kelompok tersebut tidak melawan dalam proses hukum yang dilakukan oleh Pemerintah AS di perbatasan (BBC, 2019).

Adanya kebijakan proteksionis ini menjadi penguatan argumen dari kelompok skeptis. Amerika Serikat secara tidak langsung mendukung argumen skeptis negara yang memiliki *power* untuk membendung arus yang dibawa oleh globalisasi. Dalam kasus ini, para imigran menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, sehingga diciptakan kebijakan proteksionis. Hal tersebut berarti Amerika Serikat tidak hanya mendapatkan berkah dari globalisasi, namun juga ancaman, seperti yang dijelaskan oleh kelompok skeptis.

KESIMPULAN

Tidak ada negara yang benar-benar sepenuhnya mendapatkan dampak baik globalisasi tanpa mendapat dampak buruknya, sehingga terjadi dilema. Hal tersebut juga

terjadi pada kosmopolitanisme. Amerika Serikat selaku negara penyebar sekaligus *role model* dari demokrasi dan memiliki sumbangsih yang tinggi dalam perkembangan globalisasi di abad ke-21, pada kenyataannya tidak mampu menciptakan idealisme dari kosmopolitanisme dari berbagai bentuk mulai dari moral, hukum, romantisme, dan lain-lain, bahkan memberikan resistensi hingga berujung kegagalan. Amerika Serikat memiliki tingkat keadilan yang rendah di bidang kesetaraan kedudukan yang mana diakibatkan oleh sikap dan perilaku rasisme yang telah mendarah daging di masyarakatnya. Hal tersebut menimbulkan konflik dan kebencian yang berkepanjangan di kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika Serikat dan adanya kebencian dan penolakan terhadap budaya Bangsa Eropa yang tersebar luas di negara-negara di dunia ini, sehingga tujuan dari kosmopolitanisme yakni perdamaian abadi dan persatuan negara beserta penduduknya menjadi sulit untuk tercapai. Selain itu, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat semakin mempersulit realisasi Kosmopolitanisme karena bukannya meghasilkan integrasi, yang terjadi adalah pemutusan interaksi antarmasyarkat dunia.

Resistensi hingga kegagalan Amerika Serikat dalam menciptakan kosmopolitanisme juga semakin menguatkan argumen kelompok skeptis, yang membuktikan bahwa negara memiliki *power* dalam menolak dampak globalisasi. Selain itu, terbukti bahwa Amerika Serikat mendapatkan dampak negatif dari globalisasi, tidak hanya dampak positif saja seperti argumen kelompok *hyper-globalis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, G. A. (2019). PERKEMBANGAN BUDAYA KOSMOPOLITAN DI BATAVIA 1905-1942. *Handep Jurnal Sejarah dan Budaya*, 3(1).
- BBC. (2019, Januari 24). *Tembok Trump: Semua yang perlu Anda ketahui dalam tujuh bagan*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46984889>
- British Broadcasting Corporation. (2020, November 17). *US hate crime highest in more than a decade - FBI*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54968498>
- Burton, G. (1999). *Pengantar Untuk Memahami: Media Dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Castells, M. (2006). *Globalisation and Identity: A Comparative Perspective*. Transfer.
- D, H. A., & Sarifudin, M. (2017). Globalisasi sebagai Katalis Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme: Studi Kasus Resistance Cina terhadap Kosmopolitanisme. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2).
- Edmunds, J. (2015). Human rights, Islam and the failure of cosmopolitanism. *Ethnicities*, 13(6).
- FBI's Hate Crime Statistics. (2019). *2019 Hate Crime Statistics*. Retrieved from Hate Crime Statistics: <https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics>
- Giulianotti, R., & Robertson, R. (2009). *Globalization & Football*. California: SAGE Publications Ltd. Retrieved from https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/26780_02_Giulianotti_Ch_02.pdf
- Griffith, M., & O'Callaghan, T. (2002). *International Relations: The Key Concept*. London: Routledge.
- Lustig, M. W., & Koester, J. (2003). *Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures*. USA: Allyn And Bacon.
- Mayasari, M. D. (2019). Transformasi Pandangan Perdagangan Internasional Amerika Serikat di Era Globalisasi. *Dauliyah*, 4(2).
- MNC Play. (n.d.). *BUKTI KEUNIKAN SEPAKBOLA DI AMERIKA SERIKAT: MLS*. Retrieved from MNC Play: <https://www.mncplay.id/en/bukti-keunikan-sepakbola-di-amerika-serikat-mls/>
- Musa, N. d. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *JURNAL PESONA DASAR*, 3(3).

- Noris, P. (2000). Global Governance and Cosmopolitan Citizens. In J. S. Nye, & J. D. Donahue, *Governance in a Globalizing World*. Washington: Brookings Institution Press.
- Pauline. (1999). Six Varieties of Cosmopolitanism in Late Eighteenth-Century Germany. *Journal of the History of Ideas*.
- Statista Research Department. (2020, November 17). *Number of victims of race-based hate crime in the United States in 2019, by race*. Retrieved from Statista: <https://www.statista.com/statistics/737690/number-of-racist-hate-crime-victims-in-the-us-by-race/>
- Sujati, B. (2018). Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam Dunia Islam. *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(2).
- Wieske, S. (2018). Evaluating Cosmopolitanism. *Global Societies Journal*, 6.
- Politics and Political Order in Indonesia" dalam prosiding "The Role of Identity in Politics and Policy Making" pada November 2019.

BIOGRAFI

Naufal Fikri Khairi, mahasiswa aktif di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Alumni Researcher di *Indonesia International Studies Utilization Community* (IISAUC) dan *Center for Intermestic Studies* (CIS). Memiliki minat melakukan penelitian seputar isu hubungan internasional. Pernah mempublikasi beberapa paper diantaranya yaitu "Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara" di Jurnal Anterior pada Mei 2021, "Layu Sebelum Berkembang: Studi Kasus Kerjasama Sister City Malang dengan Fuqing dalam Komoditas Kedelai" di Jurnal Global Focus pada Juli 2021, "Agro-Based Smart City Kota Batu: Implementasi dan Tantangan" di Jurnal Kebijakan Publik pada September 2020, "The Impact of Reopening Zheng He's Maritime Silk Road through One Belt One Road Policy on Indonesia–China Cooperation" di Journal of Integrative International Relations pada Mei 2020, "Analisis Pembentukan Kerja Sama Keamanan ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terrorisme" di Jurnal Insignia pada tahun November 2019, dan "The Identity